

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari analisis penelitian tentang “Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Dari Pernikahan Siri Studi KUA Kecamatan 2 x 11 Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman”, penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Proses penetapan wali nikah bagi calon pengantin perempuan yang orang tuanya melangsungkan pernikahan siri diawali dengan verifikasi dan pemeriksaan berkas administrasi oleh pihak Kantor Urusan Agama. Dalam hal orang tua calon pengantin tidak dapat menunjukkan bukti autentik berupa akta nikah, KUA terlebih dahulu mengarahkan pihak keluarga untuk mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama guna memperoleh kepastian status legal. Apabila permohonan tersebut tidak memungkinkan atau tidak dapat dipenuhi, status anak perempuan secara administratif diperlakukan menyerupai anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah. Akibatnya, hubungan keperdataan formal dengan ayah biologisnya terputus, sehingga hak perwalian nasab tidak dapat dijalankan dan dialihkan kepada penggunaan wali hakim agar proses perkawinan tetap memiliki legalitas hukum.
2. Langkah KUA Kecamatan 2x11 Enam Lingsung dalam menetapkan wali hakim dilandasi oleh asas kepastian hukum dan keteraturan administrasi sebagaimana diatur pada Kompilasi Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan pernikahan yang berlaku. Dilihat dari kacamata hukum Islam, khususnya aspek hukum wadhi, ketiadaan akta nikah orang tua berperan sebagai penghalang bagi ayah kandung untuk bertindak sebagai wali nasab formal dalam pencatatan negara. Penggunaan wali hakim diposisikan sebagai alternatif hukum untuk melindungi hak pengantin perempuan, menjamin keabsahan akad nikah secara syariah, sekaligus menghindari potensi kemudharatan di masyarakat

5.2 Saran

1. KUA Kecamatan 2x11 Enam Lingkung bersama Kementerian Agama diharapkan secara berkesinambungan meningkatkan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat terkait krusialnya pencatatan pernikahan secara legal. Selain itu, pihak KUA perlu memfasilitasi serta memperjelas saluran koordinasi dan pendampingan prosedur itsbat nikah bagi keluarga yang terlanjur menikah siri, guna meminimalisasi kendala penetapan wali nikah serta dampak keperdataan bagi anak perempuan di masa mendatang.
2. Masyarakat luas, khususnya pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan, diharapkan dapat mematuhi prosedur hukum negara dengan mendaftarkan pernikahan secara resmi di KUA. Tokoh masyarakat, niniak mamak, dan alim ulama juga disarankan untuk aktif meluruskan persepsi adat maupun agama di lingkungan setempat, sehingga seluruh anggota masyarakat memahami bahwasanya kepemilikan dokumen administrasi nikah yang sah sangat krusial untuk menjamin kepastian status hukum dan hak-hak anak keturunan mereka kelak

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. (2012). *Hukum Keluarga Islam di Inonesia*.
- Adinda Dewi Mutiara Sari, & Seno Aris Sasmito. (2022). Penetapan Wali Hakim Dalam Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar Tahun 2020. *El-Usrah : Jurnal Hukum Keluarga*.
- Abdurrahman. (2010). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Agustin Hanapi, & Manshur. (2024). Perlindungan Anak dari Nikah Sli Menurut Hukum Positif Indonesia. *KALAM*.
- Ahmad Nurfatoni. (2022). Pandangan Penghulu Terhadap Implementasi Taukil Wali Dalam Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019. *Studi Di Kabupaten Batang*.
- Amir Syarifuddin. (2021). Hukum Pernikahan Islam di Indonesia . *Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Pernikahan*.
- Azwar, Z. and E. (2021). Kawin Hamil Akibat Zina. *Studi Terhadap Perspektif Masyarakat Nagari Ranah Pantai Cermin Solok Selatan*.
- Az-Zuhaili, W. (2011). Damaskus: Dar al-Fikr. *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, .
- Dahwadin, & Muhibban. (2022). Tafsir Ayat-Ayat Al-Quran Tentang Wali Dalam Pernikahan Menurut Ulama. *Change Think Journal*.
- Dede Nurdin. (2022). Media Hukum dan Pendidikan. *At-Tadbir*.
- Dr. H. A. Kumaedi Jafar, S. Ag. , M. H. (2020). *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*.
- Dzikratul Husna. (2022). *Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan di Kecamatan Padang Timur*.
- Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 4468 Tahun 2019 tentang Wali Hakim dan Taukil Wali. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.
- Eva Nur Hopipah, & Mujiyo Nurkholis. (2023). Telaah Klasifikasi Hukum Syara. *Jurnal Pendidikan Islam*.
- Faizah N. (2023). The Concept Of Marriage Guardian In The Perspective Of Islamic Law. *YUDISHTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan*.

- Fathonah K Daud, & Ramdani Wahyu Sururuie. (2021). Analisis Pernikahan Tanpa Wali di Indonesia Perspektif Fiqh dan Hukum Positif. *Akademika*.
- Fauzan, & Ahmad. (2022). *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*.
- Febrino, R. (2025). Tahapan Pelaksanaan Pelayanan Pencatatan Pernikahan di KUA Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung. Ikhlas Beramal.
- Ghozali. (2013). *Fiqh Munakahat*.
- Hakim Sariansyah. (2025). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pak kaum yang menjadi wali nikah dalam pernikahan*.
- Ibn Rushd. (2017). *Bidayat A-Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtasid*.
- Ibnu Sina. (2024). Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Ilmu Sains . *Repository CV Widina Media Utama*.
- Ibrahim Husain. (2018). Fiqh Perbandingan. *Jakarta Ihya Ulumuddin*.
- Indah Tri Wahyuni. (2020). *Berpindahnya Wali Nasab Ke Wali Hakim Dalam Pernikahan Pada Tahun 2018 Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru*.
- Iwan. (2022). Akta Nikah sebagai bukti otentik pernikahan di indonesia. *Al-Usrah : Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsyah*.
- Jazari. (2020). *Tidak Sahnya Perwalian Karena Tidak Sahnya Pernikahan*.
- Jamil, E. N. (2026). Fikih Munakahat.
- Kamila, M. Z. . (2022). Dinamika Politik dalam Penyusunan Undang-Undang Nomoe 1 Tahun 1974. *Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*.
- Kharlie, & Ahmad Tholabi. (2022). *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer*.
- Kasmir, M. (2025). Analisis Efektivitas Pelayanan Publik Urusan Keagamaan Pasca Pelantikan Struktural Kantor Urusan Agama di Kabupaten Padang Pariaman. *Kebijakan Hukum Islam Dan Kebijakan Publik*.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.
- Lingkung, K. K 2x11 E. (2025). Laporan Evaluasi Kinerja dan Profil Implementasi Zona Integritas KUA Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman.

- Madina. (2023). *Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Hasil Pernikahan Siri di KUA Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto Perspektif Mazhab Syafii*.
- Mahmud Yunus. (2023). *Pernikahan Dalam Islam*. Jakarta : Penerbit Bulan Bintang.
- Masna Yunita, & Intan Sahera. (2022). *Wakalah Wali Nikah*. Al-Ahkam.
- Maulida S. (2021). *Wali Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam. Analisis Yuridis Normatif*. Al-Adalah.
- Moh. Rizal Yasin. (2025). *Pernikahan Dini dalam Perspektif Agama dan Hukum Positif*.
- Muh Sirojul Munir, & Mohamad Nur Yasin. (2022). *Penetapan Wali Nikah oleh Kantor Urusan Agama Bagi Anak Perempuan Hasil Poligami Siri Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda*. Syntax Literate.
- Muhammad Luthfi Syarifuddin. (2022). *Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah*. An-Nuha.
- Muhammad Saifudin Hakim. (2024). *Hadis : Wali adalah syarat sah akad nikah*. Fikih Keluarga.
- Muslikhah. (2011). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor Penyebab Terjadinya nikah wali Hakim*.s
- Nazir Ullah, S. N. R. Q. I. (2021). *Child Marriages : International Laws and Islamic Laws Perspective*. Journal Of Educational and Social Research.
- Norcahyono. (2021). *Hukum Keluarga Islam*.
- Novi Handayani. (2020). *Istbat Nikah dengan Wali Nikah Khatik Nagari*.
- Nurjani, & Arianto. (2024). *Peralihan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam*. JURIH : Jurnal Ilmu Hukum.
- Putri Sabrina Hayani. (2025). *Perpindahan wali nasab ke wali hakim di KUA kecamatan Lubuk Begalung kota padang*.
- Qomarudin, & Halimah Sadiyah. (2024). *Kajian Teoritis tentang Teknis Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif*. Journal Of Management, Accounting and Administration.
- Rahma Fitria Fatma Sari. (2025). *Penetapan Wali Hakim bagi Anak dari Pernikahan Tidak Tercatat Analisis Maqashid Syariah*.
- Rahmawati. (2020). *Perbandingan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*.

- Resa Yusfika. (2024). *Penetapan Wali Hakim Dalam Pernikahan Di KUA Ajibarang Kabupaten Banyumas Perspektif Hukum Islam*.
- Riduan S. (2006). *Seluk Beluk Asas Asas Hukum Perdata*. Banjarmasin, PT Alumni.
- Rindiani Rahmi, & Noraida Fitri. (2025). Analisis Terhadap Gugurnya Wali Aqrah Dalam Pernikahan Wali. *Indonesian Journal Of Ilmaic Jurisprudence, Economic Dan Legal Theory*.
- Rinwanto, & Yudi Arianto. (2020). Kedudukan Wali dan Saksi Dalam Pernikahan Perspektif Ulama Mazhab. *Hukum Islam Nusantara*.
- Rofiq, & M. Khoirur. (2021). *Hak Anak Dalam Keluarga Islam Inonesia*.
- Rustam. (2019). *Analisis Hukum Kedudukan Wali Hakim dalam Pernikahan*.
- Solahudin. (2023). Analisis Hukum Pernikahan Menggunakan Wali Hakim Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. *As: Sakinah Jurnal Hukum Keluarga*.
- Suarjana Suarjana, & Muzawir. (2023). Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Menurut Hukum Islam. *Al-Balad : Journal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*.
- Sudarto. (2020). *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Qiara Media.
- Susilawati dan Try Bunga Firma. (2023). Marginalisasi Perempuan dalam Pernikahan di Kalangan Mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang. *Studi Islam Gender Dan Anak*.
- Sudarsono. (2022). Perlindungan Hukum Hak Waris Istri Kedua dari Pernikahan Tidak Tercatat. *Perbedaan Fiqh dan Hukum Positif*
- Salleh, S. (2025). Administrasi Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan 2 x 11 Enam Lingsung. Ikhlas Beramal.
- Sonica. (2025). Profil KUA Kecamatan 2x11 Enam Lingsung. KUA Kecamatan 2x11 Enam Lingsung.
- Tristina, D. S. M. N. (2023). Peralihan akad nikah berwali hakim pengganti wali nasab menurut hukum islam. *Journal Of Youth Research and Studies*.
- Wahbah Az-Zuhaili. (2011). *Alih Bahasa Abdul Hayyie* . Jakarta : Gema Insani.
- Wirfa Ardi Neli. (2022). *Wali Nikah bagi anak perempuan dari hasil pernikahan yang tidak tercatat di KUA Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solol Selatan Dalam Perspektif Hukum Islam*.

Yani Mulia. (2018). *Tinjauan Hukum Islam terhadap peralihan wali nikah dari ayah kepada saudara laki-laki dinagari kampung pinang kecamatan lubuk basung kabupaten agam.*

Yenni Farida. (2017). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Peralihan Wali Nasab Kepada Wali Hakim.*

Zamani, & Saif Adli. (2020). *Penghulu Sebagai Wali Hakim dalam Akad Nikah.*

Zatnika. (2021). *Analisis Konsep Wali Nikah dalam KHI.*

